

POSISI PERKEMBANGAN UKM

Harus diakui bahwa UKM merupakan potensi yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Karena selain memiliki jumlah yang besar, UKM juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan. Dari segi kuantitatif, jumlah pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 40.197.611 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,86 persen di antaranya adalah usaha kecil (40.137.773), dimana 97,6 persen di antaranya adalah usaha mikro. Sedang jumlah usaha berskala menengah sebanyak 57.743 atau 0,14 persen, dan usaha besar hanya 0,005 persen atau berjumlah 2.095 saja (BPS, 2001).

Kontribusi UKM juga amat jelas. Usaha kecil dan menengah yang jumlahnya dominan tersebut, mampu menyediakan 99,04 persen lapangan kerja. Demikian halnya sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Non Migas, cukup meyakinkan yaitu sebesar 63,11% persen. UKM juga memberikan kontribusi pada ekspor non migas sebesar 14,20% (BPS, 2001). Hal ini berarti pada sektor-sektor dimana terbuka bagi masyarakat luas UKM mempunyai sumbangan yang nyata. Sehingga kemampuan untuk melahirkan percepatan pemulihan ekonomi akan ikut ditentukan oleh kemampuan menggerakkan UKM.

Di sisi lain UKM juga menghadapi berbagai permasalahan yang cukup krusial. Secara spesifik setidaknya terdapat empat permasalahan internal dan delapan permasalahan eksternal, yang merupakan problem klasik yang dihadapi UKM.¹ Keempat permasalahan internal tersebut adalah: (1) terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan; (2) rendahnya kemampuan SDM; (3) ditinjau dari konsentrasi pekerjaan sumberdayanya, pengembangannya terhambat oleh konsentrasi rakyat di pedesaan yang bergerak pada sektor pertanian; (4) kelembagaan usaha belum berkembang secara optimal dalam penyediaan fasilitas bagi kegiatan ekonomi rakyat.

Sementara kedelapan permasalahan eksternal yang dimaksud adalah: (1) terbatasnya pengakuan dan jaminan keberadaan UKM; (2) kesulitan mendapatkan data yang jelas dan pasti tentang jumlah dan penyebaran UKM; (3) alokasi kredit sebagai aspek pembiayaan masih sangat timpang, baik antargolongan, antarwilayah, dan antardesa-kota; (4) sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek; (5) rendahnya nilai tukar komoditi yang dihasilkan; (6) terbatasnya akses pasar; (7) terdapatnya pungutan-pungutan atau biaya siluman yang tidak proporsional; (8) munculnya krisis ekonomi dengan berbagai implikasinya.

Beberapa problem lain yang juga tak kalah seriusnya, antara lain, mekanisme perencanaan dari atas ke bawah yang tidak efektif untuk mengatasi detail-detail problematika faktual yang dihadapi UKM; perumusan program yang tidak terkait dengan prakondisi dasar pemberdayaan ekonomi rakyat (yakni mentalitas *entrepreneurship*); masih adanya kelompok-kelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan; hingga jaring-jaring korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih kuat.²

Sejak krisis moneter muncul, dan kemudian diikuti krisis ekonomi lebih luas, dampak tidak menyenangkan dialami pula di sektor UKM. Hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, antara lain: (1) tingginya bunga kredit, sehingga suplai kredit

¹ Adi Sasono, "Hambatan dan Pokok Persoalan Ekonomi Rakyat" dalam Adi Sasono "Pikiran, Langkah, dan Komitmennya terhadap Ekonomi Kerakyatan", (CIDES, 2000) h.74.

² Indra Ismawan, "Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah" (Grasindo, 2001)

berkurang, berakibat pada kurang terbukanya sektor produksi; (2) tingginya biaya impor bahan baku dan suku cadang, yang mengakibatkan meningkatnya biaya produksi, sehingga keperluan modal kerja meningkat; (3) tingginya biaya untuk permesinan, peralatan, dan suku cadang, yang berkaitan dengan teknologi; (4) *cash flow* terganggu akibat lambatnya pembayaran utang; (5) nilai tukar mata uang asing yang masih *volatile*, meningkatkan risiko transaksi antarnegara.³

Rintangan-rintangan di atas, bagaimanapun menghalangi pembentukan kelas wirausaha yang bebas mendirikan perusahaan mereka sendiri. Perusahaan kecil dan menengah sering tampak sebagai usaha sia-sia dan nirlaba. Padahal, aktivitas wirausaha dibutuhkan untuk membangun sebuah kekuatan ekonomi berbasis luas. Ada hubungan kuat antara eksistensi kelas wirausaha yang kokoh dengan sebuah kondisi ekonomi yang beragam, dan keduanya berpadu untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih ulet, menghadapi perilaku pasar internasional, yang tidak selalu dapat dipastikan, dan berkemampuan menyediakan kesempatan pekerjaan yang lebih besar dengan biaya lebih murah.⁴

³ Lihat, Soeharto Prawirokusumo, “Ekonomi Rakyat, Konsep, Kebijakan, dan Strategi” (BPFE, 2001).

⁴ Lihat, poin “Mendorong Perusahaan-perusahaan Bisnis Kecil dan Menengah” dalam “Penilaian Demokratisasi di Indonesia” diterbitkan oleh Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (International IDEA), 2000.